



PEMERINTAH
KABUPATEN
LAMONGAN

MITIGASI RISIKO

TRIBULAN 1 & 2
2025

DINAS PU BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN

TRIBULAN 1 &



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Jalan Mastrip Nomor 61, Lamongan, Jawa Timur 62216
Telepon (0322) 321170, Pos-el pubmg@lamongan.go.id,
Laman www.lamongankab.go.id

Lamongan, 30 Juli 2025

Nomor : 600.1.18/ 277.A
/413.103/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan Pengelolaan
Resiko Tribulan I & 2
Tahun 2025 Dinas PU
Bina Marga Kabupaten
Lamongan

Yth. Sdr. BUPATI LAMONGAN

di
Lamongan

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan 1 & 2
Tahun 2025 Dinas, sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

Plt. KEPALA DINAS PU. BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN


Drs. M. S. HERUWIDI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690219 198809 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
JI. Mastrip No. 61 Lamongan – Kode Pos 62216
Telp. (0322) 321170 E – mail : pubmrg@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan VIVI FEBRIANTI, S.STP.,MM 19950218 201708 2 002 Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
Diperiksa	:	Sekretaris Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan SITI ZULKHAH, ST.,M.M 19740713 199901 2 001 Sekretaris Dinas PU Bina Marga
Disahkan Oleh	:	Pj. KEPALA DINAS PU BINA MARGA KAB. LAMONGAN Drs. M. S. HERUWIDI, M.M 19690219 198809 1 001 Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko merupakan suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui maupun belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang

- Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;

- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I & 2

DINAS PU Bina Marga Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV tahun 2025 sebagaimana terlampir. (lampiran 1)

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I & 2

DINAS PU Bina Marga Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1 & 2 tahun 2025, yang telah dilaksanakan adalah:, dan yang belum dilaksanakan adalah (lampiran 2)

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Kendala terhambatnya kegiatan pengendalian Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- a. Hambatan yang menyebabkan penyajian data perencanaan tidak tepat waktu adalah kondisi fasilitas kantor yang belum memadai dan belum terkumpulnya data yang dibutuhkan, serta banyaknya permintaan data secara bersamaan.
- b. Hambatan yang menyebabkan terlambatnyaengerjaan konstruksi adalah kurangnya kemampuan financian plant dari pemenang lelang dan keterbatasan kesiapan batching plant, AMP dari penyedia bahan material.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 4 dapat simpulan bahwa bahwa potensi - potensi resiko yang terjadi di Dinas Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian resiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya resiko. Sehingga diharapkan pengendalian resiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkret dan efesien sesuai dengan potensi resiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian resiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian resiko.

LAMPIRAN 1
(Form 9 APLIKASI Simario)

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN 1 & 2

Formulir Kertas Kerja
 Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Tahun	
Penilaian	2025
Periode yang	
Dinilai	2025
Tujuan	
Strategis	Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko
Urusan	
Pemerintahan	PU dan Tata Ruang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD						
1	Menyusun perencanaan dengan mempertimbangkan perolehan anggaran dan paket pekerjaan jalan dan jembatan yang sesuai sasaran	Menerapkan sistem pemantauan real-time untuk memantau pelaksanaan metode atau program secara langsung untuk memungkinkan deteksi dini masalah dan perbaikan cepat	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
2	Evaluasi terhadap paket pekerjaan yang telah berjalan	1. Pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan paket pekerjaan 2. Laporan hasil fisik paket pekerjaan jalan dan jembatan	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
3	Mengembangkan rencana pengelolaan krisis untuk merespons isu yang dapat merusak reputasi dengan cepat dan tepat	Menerapkan sistem pemantauan real-time untuk memantau pelaksanaan metode atau program secara langsung untuk memungkinkan deteksi dini masalah dan perbaikan cepat	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal

Risiko Operasional OPD

1	Mengembangkan perencanaan anggaran yang rinci dan realistik dengan mempertimbangkan semua kemungkinan pengeluaran	Menerapkan sistem pemantauan real-time untuk memantau pelaksanaan metode atau program secara langsung untuk memungkinkan deteksi dini masalah dan perbaikan cepat	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
2	Melakukan penilaian pegawai dengan keahlian yang dibutuhkan secara berkelanjutan untuk mengisi kekosongan posisi dan mengantisipasi kebutuhan masa depan	Melakukan pengawasan langsung dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
3	Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan dokumentasi	Menerapkan sistem pemantauan real-time untuk memantau pelaksanaan metode atau program secara langsung untuk memungkinkan deteksi dini masalah dan perbaikan cepat	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
4	Meningkatkan koordinasi antara departemen untuk memastikan kebutuhan pengadaan terpenuhi tepat waktu	Menerapkan sistem pemantauan real-time untuk memantau pelaksanaan metode atau program secara langsung untuk memungkinkan deteksi dini masalah dan perbaikan cepat	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
5	Mengadakan pelatihan keamanan bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan respons terhadap ancaman keamanan	Menerapkan sistem pemantauan real-time untuk memantau pelaksanaan metode atau program secara langsung untuk memungkinkan deteksi dini masalah dan perbaikan cepat	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
6	Penggunaan teknologi yang mampu meminimalisir dampak bencana alam dan melaksanakan Survei yang memadai terhadap kondisi geologi dan kondisi alam lainnya pada saat desain	Melakukan pengawasan langsung dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
7	Sebelum serah terima pekerjaan diadakan pemanggilan konsultan pelaksana oleh pihak terkait untuk mengetahui baik kemampuan dalam hal finansial, SDM hingga alat berat serta metode kerja yang dilakukan	Melakukan pengawasan langsung dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal

LAMPIRAN 2
(Form 10. APLIKASI Simario)

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN 1 & 2

**Formulir Kertas Kerja
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) dan RTP**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian : 2025

Tujuan Strategis
Pemda

Urusan Pemerintahan : PU dan Tata Ruang

Dinas Terkait : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD										
1	Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran kas	RSO.25.03.04.19	Januari s/d Desember	Keterbatasan anggaran	Indeks infrastruktur jalan dan jembatan tidak tercapai	Berubahnya prioritas pimpinan yang mempengaruhi wilayah perbaikan infrastruktur	Menyusun perencanaan dengan mempertimbangkan perolehan anggaran dan paket pekerjaan jalan dan jembatan yang sesuai sasaran	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
2	nilai SAKIP Internal belum optimal	RSO.25.03.04.19	Januari s/d Desember	Kurangnya pemahaman terkait implementasi SAKIP	Nilai SAKIP PU Bina Marga menurun	Dokumen administrasi yang belum lengkap	Melakukan evaluasi kinerja yang dilakukan kepada seluruh pegawai secara berjenjang	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
3	Reputasi dan Kepercayaan Publik	RSO.24.03.04.19	Januari s/d Desember	Adanya ketidakpuasan masyarakat atau stakeholder terhadap hasil perencanaan dan evaluasi yang dapat merusak reputasi dinas	merusak reputasi dinas dan menurunkan kepercayaan publik tehadap setiap pekerjaan yang akan dikerjakan oleh dinas	Beberapa lokasi infrastruktur yang sudah mengalami kerusakan namun belum dilakukan perbaikan dikarenakan Dinas mengutamakan lokasi lokasi yang lebih darurat membutuhkan perbaikan	Mengembangkan rencana pengelolaan krisis untuk merespons isu yang dapat merusak reputasi dengan cepat dan tepat	Tribulan I s/d IV 2024	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
Risiko Operasional OPD										
1	Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran kas	RSO.24.03.04.02	Januari s/d Desember	adanya pengurangan alokasi anggaran karena perubahan prioritas di sektor lain serta pengeluaran yang tidak	adanya pengurangan baik kualitas maupun kuantitas program kerja yang sebelumnya direncanakan hingga penundaan atau	Perubahan anggaran membuat adanya pekerjaan yang mengalami refocusin untuk memusatkan anggaran ke pekerjaan yang darurat terlebih dahulu	Mengembangkan perencanaan anggaran yang rinci dan realistik dengan mempertimbangkan semua kemungkinan pengeluaran	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
				terduga	pembatalan kegiatan					
2	Kinerja pegawai belum optimal	RS0.24.03.0 4.03	Januari s/d Desember	Kurangnya tenaga ahli atau staf yang terlatih dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	pelaksanaan penyusunan perencanaan serta evaluasi yang lambat serta laporan keuangan yang banyak mengalami revisi	kurangnya pegawai yang memiliki keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan Dinas	Melakukan penilaian pegawai dengan keahlian yang dibutuhkan secara berkelanjutan untuk mengisi kekosongan posisi dan mengantisipasi kebutuhan masa depan	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
3	Layanan administrasi umum kurang maksimal	RS0.24.03.0 4.04	Januari s/d Desember	Kesalahan dalam pengelolaan dokumen atau proses administrasi yang menyebabkan ketidakakuratan data dan laporan	Masalah kepatuhan, kesalahan perencanaan, dan potensi sanksi administratif	Dokumen administrasi yang belum lengkap	Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan dokumentasi	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
4	Sarana dan prasarana kurang terpelihara	RS0.24.03.04.05	Januari s/d Desember	Proses pengadaan yang lambat atau tertunda dapat menghambat pelaksanaan proyek	Penundaan proyek, ketidakpuasan pemangku kepentingan, dan potensi peningkatan biaya	kurangnya sistem keamanan seperti CCTV dan penjaga terutama untuk alat-alat berat yang mengakibatkan persentase kehilangan meningkat	Meningkatkan koordinasi antara departemen untuk memastikan kebutuhan pengadaan terpenuhi tepat waktu	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
5	Pemanfaatan alat berat kurang maksimal	RS0.24.03.04.06	Januari s/d Desember	Terjadinya Pencurian, vandalisme, atau gangguan keamanan lainnya terhadap aset	mengakibatkan terjadi Kehilangan aset yang mengharuskan peningkatan biaya keamanan dan terjadinya gangguan operasional	beberapa alat berat belum sempat dilakukan pemeliharaan rutin karena kurangnya kesadaran pemakai aset	Mengadakan pelatihan keamanan bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan respons terhadap ancaman keamanan	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
6	Bencana alam dan cuaca ekstrim	ROO.24.03.04.19	Januari s/d Desember	Risiko yang berasal dari kejadian alam seperti gempa bumi, banjir, atau kondisi cuaca ekstrim yang dapat merusak proyek atau menunda penggerjaan	mengakibatkan keterlambatan / kegagalan pekerjaan	terhambatnya pekerjaan karena bencana seperti banjir	Penggunaan teknologi yang mampu meminimalisir dampak bencana alam dan melaksanakan Survei yang memadai terhadap kondisi geologi dan kondisi alam	Tribulan I s/d IV 2024	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
								lainnya pada saat desain		
7	Kegagalan manajemen proyek	ROO.24.03.04.19	Januari s/d Desember	Keterlambatan perolehan persetujuan perencanaan, terlambat penyelesaian konstruksi dan kinerja subkontraktor yang buruk	mengakibatkan keterlambatan pekerjaan	konsultan pelaksana mengerjakan proyek dengan mengandalkan penyedia lain untuk mamasok bahan atau tenaga kerja dan hal ini terkadang terjadi miskomunikasi yang mengakibatkan terlambatnya proyek	Sebelum serah terima pekerjaan diadakan pemanggilan konsultan pelaksana oleh pihak terkait untuk mengetahui baik kemampuan dalam hal finansial, SDM hingga alat berat serta metode kerja yang dilakukan	Tribulan I s/d IV 2024	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal